

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses **perubahan** sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada **pembangunan** bangsa dan sosial ekonomis. Untuk mewujudkan pembangunan bangsa diperlukan pilar yang kuat dari segi pembangunan ekonomi. Menurut Suparmoko (2002:5) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya **pendapatan riil** perkapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); dimana adanya pelimpahan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka

pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki tanpa terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987:82). Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut

mengalami penurunan. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan prasarana transportasi (Zaris, 1987: 86).

Pertumbuhan ekonomi daerah Asahan dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam wilayah Kabupaten Asahan. Dalam menghitung pendapatan regional, dipakai konsep Domestik yang berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu wilayah/region (dalam hal ini Kabupaten) dihitung dan dimasukkan, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan, walaupun kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku 2004 – 2008 (Milliar Rp)

No	Lapangan Usaha/ Industrial Origin	2004		2005		2006		2007		2008	
1	Pertanian/Agriculture	2.227.033,49	29,36	2.404.732,72	27,9	2.679.951	36,91	3.057.890	37,20	3.609.943	37,80
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarries	15.667,05	0,20	16.911,65	0,10	18.097	0,25	19.611	0,24	21.786	0,23
3	Industri / Manufacturing	1.466.345,09	40,09	1.908.321,71	40,7	2.229.854	30,71	2.484.398	30,22	2.837.481	29,71
4	Listrik, Gas dan Air Minum	83.696,71	1,05	96.918,99	1,10	105.824	1,46	117.290	1,43	133.240	1,40
5	Bangunan / Construction	138.607,77	1,89	56.5551,82	1,88	175.941	2,42	201.179	2,45	233.356	2,44
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	818.285,28	18,73	955.247,57	19,3	1.100.805	15,16	1.292.011	15,72	1.562.490	16,36
7	Pengangkutan dan Komunikasi Transportation and Communication	254.152,84	3,07	296.571,21	3,27	331.329	4,56	374.489	4,56	437.791	4,58
8	Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	158.948,34	2,22	181.609,72	2,24	201.857	2,78	223.198	2,71	220.284	2,31
9	Jasa-jasa / Services	370.091,20	3,38	397.730,93	3,31	417.112	5,74	451.105	5,49	494.707	5,18
PDRB/GDRP		5.532.879,77		6.416.596,26		7.260.768,7		8.221.172		9.551.080	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Asahan disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan usaha persewaan dan jasa-jasa (BPS 2008:358). Pada tahun 2008 PDRB Kabupaten Asahan atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 9,551 triliun rupiah. Sektor pertanian merupakan kontributor utama yang memberikan peranan sebesar 37,80 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Industri 29,71 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,36 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya menyumbang total kontribusi sebesar 16,76 persen.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2004 – 2008 (Milliar Rp)

No	Lapangan Usaha/ Industrial Origina	2004		2005		2006		2007		2008	
1	Pertanian/Agricu Iture	1.772.605,97	26,65	1.782.844,43	26,1	1.795.560	40,32	1.824.083	39,05	1.872.554	38,25
2	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	11.547,45	0,20	11.827,70	0,20	12.156	0,27	12.516	0,27	12.894	0,26
3	Industri / Manufacturing	1.074.984,47	40,24	1.163.182,05	40,9	1.289.065	28,95	1.401.701	30,01	1.501.265	30,66
4	Listrik, Gas dan Air Minum	47.963,99	0,96	52.265,89	1,0	1.289.065	1,21	1.401.701	1,21	1.501.265	1,21
5	Bangunan / Construction	103.703,33	2,22	107.474,30	2,25	112.213	2,52	117.957	2,53	124.884	2,55
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	611.152,59	21,01	616.855,01	20,9	656.438	14,74	699.082	14,97	743.143	15,18
7	Pengangkutan dan Komunikasi Transportation and Communication	160.305,85	3,00	165.657,53	2,99	172.245	3,87	178.802	3,83	185.863	3,80
8	Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	109.763,72	2,35	113.781,70	2,37	118.682	2,67	125.280	2,68	126.259	2,58
9	Jasa-jasa / Services	229.752,32	3,38	235.362,12	3,35	242.931	5,46	255.064	5,46	270.036	5,52
PDRB/GDRP		4.121.779,69		4.249.240,78		4.453.183		4.670.899		4.896.026	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan

Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000, PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2007 mencapai 4,896 triliun rupiah. Pada tahun 2008 ini semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan mencapai 4,82 persen, pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Industri (7,10 persen). PDRB per kapita Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007. Berdasarkan ADHB naik dari Rp. 12.150.623 menjadi Rp. 13.871.718 sedangkan ADHK 2000 juga mengalami peningkatan dari Rp. 6.903.436 tahun 2007 menjadi



Rp. 7.110.850 pada tahun 2008. Adapun laju pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Asahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
The Economic Growth by Industrial Origin 2004 - 2008
(Persen / Percent)

No	Lapangan Usaha/ Industrial Origin	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian/Agriculture	1,70	0,58	0,71	1,59	2,66
2.	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	1,57	2,43	2,77	2,96	3,03
3.	Industri / <i>Manufacturing</i>	14,01	8,20	10,82	8,74	7,10
4.	Listrik, Gas dan Air Minum / <i>Electricity, Gas and Water Supply</i>	6,37	8,97	3,11	4,68	4,81
5.	Bangunan / <i>Construction</i>	1,77	3,64	4,41	5,12	5,87
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran <i>Trade, Hotel and Restaurant</i>	3,13	0,93	6,42	6,50	6,30
7.	Pengangkutan dan Komunikasi <i>Transportation and Communication</i>	2,37	3,34	3,98	3,81	3,95
8.	Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan / <i>Financial, and Ownership of Dwelling Business Service</i>	8,18	3,66	4,31	5,56	0,78
9.	Jasa-jasa / <i>Services</i>	3,27	2,44	3,22	4,99	5,87
	PDRB / GDRP	5,22	3,09	4,80	4,89	4,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Pada umumnya pembiayaan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagian Pinjaman Daerah, dan Bagian lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Selain dari pada itu penambahan terhadap pendapatan daerah diperoleh dari bagi hasil pajak dan non pajak yang diperoleh pemerintah provinsi. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah diperoleh dari hibah pemerintahan pusat (Loan ADB) dan bantuan dana kontijensi/Penyeimbangan dari pemerintah pusat.

Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 Kecamatan sedangkan Batu Bara 7 Kecamatan, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan Daerah Kabupaten Asahan secara menyeluruh.

Dalam APBN Dana yang dialokasikan ke Daerah seperti Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan bagian dari pengeluaran Pemerintah Pusat. Dimana Pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi Pengeluaran untuk Belanja dan Pengeluaran untuk Pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja terdiri dari: Belanja Pemerintah Pusat seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain. Sedangkan Pengeluaran untuk Pembiayaan terdiri dari Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah, Pembayaran

Pokok Pinjaman Luar Negeri, dan Pembiayaan lain-lain. Dalam APBD pengeluaran daerah didasarkan pada pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan dengan salah satu sumbernya adalah dari Pendapatan Asli Daerah

Selain dari pendapatan daerah, penambahan nilai penerimaan daerah Asahan diperoleh dari Investasi Perusahaan Swasta yang berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tabel 1.5 menunjukkan nilai investasi PMDN dan pada tabel 1.6 pada perusahaan PMA yang diperoleh Kabupaten Asahan.

Tabel 1.4
Daftar Perusahaan PMDN
Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan
(dalam Rp. Juta)

No	Nama Perusahaan	Kecamatan	Bidang Usaha	Investasi	Tenaga Kerja	
					TKI	TKA
1.	PT. Warisan Telma	Simpang Empat	Perkebunan Karet	61.10	78	-
2.	PT. Kisan Tobacco Company	Kisaran Timur	Industri Rokok Putih	707.20	78	-
3.	PT. Saudara Sejati Luhur	Bandar Pulau	Perk. Kelapa sawit dan Pabrik minyak kelapa sawit	8.257.80	373	-
4.	PT. Gunung Melayu	Pulau Rakyat	Perk. Kelapa sawit dan pengolahannya	46.892.20	1.042	-
5.	PT. Bakrie Sumatera Plantation	Kisaran Barat	Latex pekat, crumb rubber dan CPO dan Karna	1.252.113	4.689	-
6.	PT. Sari Persada Raya	B.P. Mandoge	Perk. Karet, Kelapa sawit, dan pengolahannya	11.624.03	262	2
7.	PT. Sanlatex Sumatera	Air Batu	Ind. Pengolahan latex dan ban kendaraan tidak bermotor	5.053.00	203	-
8.	PT. Perkebunan IV	Mandoge	Perk. Kelapa sawit terpadu dgn unit pengolahan	223.226.28	3.703	-
9.	PT. Karya Pratama Niaga Jaya	Bp. Mandoge	Inds. Pengolahan kelapa sawit	32.100	120	-
10.	PT. Ramos Agro Makmur	Sentang	Ind. Minyak makan dari nabati	96.750.00	101	-
11.	PT. Sawita Inter Perkasa	Buntu Pane	Pengolahan sawit	27.200	106	-
12.	PT. Fairco Bumi Lestari	Buntu Pane	SIR -20	41.400	237	-

Sumber : Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Asahan (data 2009)

Tabel 1.5
Daftar Perusahaan PMA
Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan
(dalam Rp. Juta)

No	Nama Perusahaan	Kecamatan	Bidang Usaha	Investasi	Tenaga Kerja		Negara Asal
					TKI	TKA	
1.	PT. Harvard Cocopro	Air Batu	Krim susu kelapa, Isi kelapa kering, krim tepung kelapa	2.200.000	40	-	Malaysia
2.	PT. Greenlife Organic Fertilizer	Air Batu, Perlompongan	Pupuk Organic	2.000.000	32	-	Malaysia
3.	PT. Socfin Indonesia	Aek Kuasan	Minyak sawit, Inti sawit	80.290.719	50	1	Belgia
4.	PT. Sri Intan Abadi	Kis Tim/ Air Joman	Tepung santan kelapa	385.000	102	6	Malaysia
5.	PT. Bakrie Industri	Kota Kisaran Timur	Industri barang-barang benang karet	9.000.000	62	-	Amerika
6.	PT. Sintong Abadi	Sentang Kisaran Timur	Glyserin, Organic Fuel Booster	57.600.000.000	140	-	Malaysia
7.	PT. Goodyear Sumatera Plantation	Bandar Pulau	Perk. Karet, dan industri crumb rubber	17.181.590	4.671	5	Amerika Serikat
8.	Brimgstone	Bandar Pulau	Perkebunan Karet				Jepang
9.	PT. Lonsum	Bandr Pulau	Perkebunan Kelapa Sawit				Inggris

Sumber : Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Asahan (data 2009)

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Asahan keadaan bulan Juni Tahun 2007 setelah terpisah dengan Kabupaten Batu Bara diperkirakan sebesar 676.605 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 182 jiwa per km². Sebagian besar penduduk bertempat tinggal

di daerah pedesaan yaitu sebesar 70,79 persen dan sisanya 29,21 persen tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 151.759 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4,5 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2007 sebesar 1,94 persen.

Tabel 1.6
Perkembangan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Asahan
2004 – 2007

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)	Kepadatan
2004	1.009.856	1,92	218
2005	1.024.369	1,82	222
2006	1.038.554	1,75	225
2007	676.605	1,66	182

Sumber : BPS Asahan

Pemekaran daerah Batu Bara mempengaruhi jumlah penduduk dan secara otomatis mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada.

Tabel 1.7
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran

No	Uraian	Tahun				
		2005 (Jiwa)	2006 (Jiwa)	2007 (Jiwa)	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)
1.	Bekerja	350.519	356.548	362.801	222.186	228.007
2.	Pengangguran	149.194	118.187	120.220	41.564	45.642
3.	Angkatan Kerja	610.771	621.276	631.962	397.427	395.167
4.	Pengangguran Terbuka	34.207	34.795	35.387	12.209	12.419

Sumber : BPS Asahan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2007 sebanyak 1.988 orang ditambah dengan sisa tahun lalu menjadi 5.396 orang yang terdiri dari 2.363 pencari kerja laki-laki dan sisanya 3.033 adalah pekerja perempuan dan 17,86 persen diantaranya sudah ditempatkan.

Tabel 1.8
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Jumlah Tenaga kerja Asing
Menurut Jabatan –Tahun 2007 (dalam orang)

No	Jabatan	Pencari Kerja Yang belum ditempatkan		Tenaga kerja Asing	
		LK	PR	Permohonan	Disetujui
1	Orang-orang yang bekerja Profesional, Ahli Teknik dan Tenaga Sejenisnya	147	297	1	1
2	Orang-orang yang bekerja di bidang kepemimpinan dan ketatalaksanaan	190	398	9	9
3	Orang-orang yang bekerja di bidang administrasi, tata usaha dan lain-lain sejenisnya	887	802	-	-
4	Orang-orang yang bekerja di bidang penjualan	125	129	1	1
5	Orang-orang yang bekerja di bidang jasa	169	490	-	-
6	Orang-orang yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan	160	231	-	-
7	Orang-orang yang bekerja di bidang produksi dan sejenisnya, operator alat-alat pengangkutan dan pekerja kasar	683	686	4	4
	Jumlah / Total	2.363	3.033	15	15

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan

Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggalan pendapatan daerah, peningkatan peran serta swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus melaksanakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom up*) agar pembangunan yang dilaksanakan daerah merupakan keinginan bersama dan sesuai dengan potensi yang ada agar kesinambungan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pendapatan daerah yang dipergunakan untuk berbagai pengeluaran pembangunan bersama dengan investasi dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Asahan. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan.

2. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan yaitu :

- 2.1. Apakah tingkat investasi, pengeluaran pembiayaan pembangunan, dan tenaga kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Asahan ?
- 2.2. Apakah tingkat investasi, pengeluaran pembiayaan pembangunan, dan tenaga kerja elastis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Asahan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 3.1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat investasi, pengeluaran pembiayaan pembangunan dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Asahan.

3.2. Untuk mengukur besarnya elastisitas tingkat investasi, pengeluaran pembiayaan pembangunan, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Asahan.

4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

4.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kontribusi tingkat investasi, pengeluaran pembiayaan pembangunan, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Asahan.

4.2. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Asahan.

